

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Suatu sistem informasi untuk seorang pegawai sangat diperlukan oleh semua instansi. Terlebih, apabila suatu instansi tersebut adalah suatu instansi dari lembaga pemerintahan. Sistem yang digunakan untuk mendukung pendataan dan penyimpanan data pegawai saat ini bisa dikatakan nyaris tidak terpakai secara optimal. Mulai dari pendataan manual, hingga pendataan secara digital yang terpisah dan tidak efisien untuk dioperasikan.

Pesatnya perkembangan globalisasi yang didukung adanya teknologi menjadi tantangan bagi instansi pemerintahan karena akan menggeser fungsi manusia menjadi suatu sistem yang dapat digerakkan dengan teknologi. Teknologi informasi merupakan suatu dukungan sarana dan prasarana yang dapat membantu instansi pemerintahan untuk menyelesaikan pekerjaannya secara efektif dan efisien dengan sumber daya manusia penggerakannya. Penggunaan teknologi saat ini sangat meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya sebanding dengan keahlian para penggunanya. Hal ini dapat menjadi tolak ukur suatu instansi pemerintah dalam menggunakan dan memanfaatkan teknologi yang ada agar mampu bersaing dalam ketidakpastian global. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk melihat efektifitas penggunaan teknologi informasi sebagai fasilitas kerja di lingkungan Pengadilan Tinggi kota Padang. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode deskriptif berupa observasi, wawancara dan studi pustaka.

Sumber daya manusia adalah penyalur gerak jalannya instansi pemerintahan

menggunakan teknologi informasi serta menjadi kunci bagi perkembangan system informasi kepegawaian. Dengan munculnya globalisasi saat ini sangat sangat mempengaruhi kualitas sumber daya yang dimiliki oleh setiap instansi pemerintahan yang ada. Pesatnya perkembangan globalisasi yang didukung oleh teknologi tentu saja memiliki tantangan tersendiri karena tentu saja akan menggeser fungsi manusia menjadi suatu sistem yang dapat digerakkan oleh teknologi. Menurut Warsono(2017) perubahan yang diindikasikan oleh perkembangan teknologi saat ini menyebabkan tenaga kerja yang memiliki potensi rendah akan kalah bersaing karena munculnya teknologi, instansi tidak membutuhkan tenaga kerja yang kasar (*blue collar*) melainkan instansi pemerintahan memerlukan tenaga kerja yang menguasai perkembangan teknologi yang ada dan memiliki bakat manajerial. Lebih lanjut menurut Warsono, SDM yang terlibat dalam proses atau kegiatan organisasi haruslah merupakan SDM yang memiliki basis pengetahuan, keterampilan dan keahlian. Oleh karena itu perlu adanya dukungan sumber daya yang memiliki kualitas dan mutu yang baik. Tidak hanya itu, bagi suatu instansi pemerintah untuk dapat bertahan ditengah pesatnya kemajuan teknologi diperlukan adanya pembaharuan dalam memperoleh serta mengolah informasi yang tersedia. Dengan sistem informasi kepegawaian yang tepat dan akurat sangat diperlukan dalam memenuhi kebutuhan organisasi.

Menurut Warsita (2008) informasi berbasis teknologi adalah sarana dan prasarana (*hardware, software, useware*) dalam suatu sistem dan metode yang digunakan untuk memperoleh , mengirimkan, mengolah, menafsirkan, menyimpan, mengorganisasikan dan menggunakan data secara signifikan. Sehingga dalam penggunaan teknologi informasi sebagai fasilitas kerja akan sangat membantu

instansi pemerintah dalam mengolah data yang dapat digunakan dalam mencapai tujuannya.

Untuk menunjang kegiatan kerja pegawainya Pengadilan Tinggi Padang menyediakan berbagai fasilitas kerja yang digunakan untuk memudahkan pekerjaan para pegawainya seperti komputer sebagai sarana yang digunakan untuk menginput seluruh data perkara yang masuk maupun keluar dari pengadilan. Penggunaan teknologi informasi ini didukung pula dengan seluruh kegiatan yang dilakukan secara sistem melalui komputer sehingga diperlukan adanya peranan penting pengetahuan pegawai dalam menggunakan serta memanfaatkan teknologi tersebut.

Pemanfaatan teknologi informasi dalam kegiatan instansi pemerintah menjadi sebuah keperluan untuk meningkatkan pelayanan di berbagai sektor ini berguna sebagai proses mendukung peran pemerintah untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang transparan yang sangat menuntut suatu instansi memperoleh informasi yang lebih cepat dan akurat, pada setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintah dilaksanakan untuk menuju *good governance*. Hal ini memerlukan sistem yang dapat mengakomodir kebutuhan pelayan dengan cepat, tepat dan tidak berbelit-belit, sehingga dengan adanya sistem informasi mempermudah konsep ini terlaksana dan fungsi pelayanan untuk mewujudkan pelayanan yang baik dan termasuk otomatisasi dalam penanganan sistem kepegawaian.

Tersedianya sebuah sistem informasi dinilai sangat penting sebagai alat bantu untuk merekam banyaknya aktifitas dan kegiatan para pegawai yang ada di pengadilan tinggi tersebut, sehingga pembuatan laporan kepada ketua Pengadilan Tinggi Padang dan Mahkamah Agung akan semakin mudah. pemodelan sistem

informasi kepegawaian akan disesuaikan dengan kebutuhan instansi secara menyeluruh, sehingga dapat digunakan secara optimal oleh Pengadilan Tinggi Padang. Berdasarkan uraian yang telah penulis jabarkan diatas, maka dalam penyusunan Tugas Akhir ini penulis mengambil judul yaitu **“Implementasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) di Pengadilan Tinggi Padang”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang di atas, dapat dibuat suatu rumusan masalah yang diselesaikan, yaitu:

1. Bagaimana prosedur penggunaan sistem informasi pada pengelolaan data kepegawaian di Pengadilan Tinggi Padang?
2. Apa saja kendala dalam proses implementasi sistem informasi kepegawaian di Pengadilan Tinggi Padang?
3. Bagaimana solusi dalam mengatasi kendala dalam proses implementasi sistem informasi kepegawaian di Pengadilan Tinggi Padang?

1.3 Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui bagaimana prosedur sistem informasi pada pengelolaan data kepegawaian di Pengadilan Tinggi Padang.
2. Untuk mengetahui apa saja kendala dalam proses implementasi sistem informasi kepegawaian di Pengadilan Tinggi Padang.
3. Untuk mengetahui bagaimana solusi dalam mengatasi kendala dalam proses implementasi sistem informasi kepegawaian di Pengadilan Tinggi Padang.

1.4 Manfaat Magang

Hasil dari kegiatan magang ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, yaitu:

1. Bagi akademis, untuk menambah wawasan dan memberikan kontribusi, serta sebagai acuan dalam terjun ke dunia kerja.
2. Bagi praktisi, dapat memberikan masukan dan saran ke instansi sesuai dengan pengetahuan dan kemampuan mahasiswa untuk kemajuan instansi tersebut.
3. Bagi siswa magang, dapat mempraktekkan ilmu yang sudah didapatkan di bangku perkuliahan dan dapat menerapkannya di dunia kerja, dan juga menambah wawasan dan meningkatkan kreativitas dalam dunia kerja.

1.5 Metode Penelitian

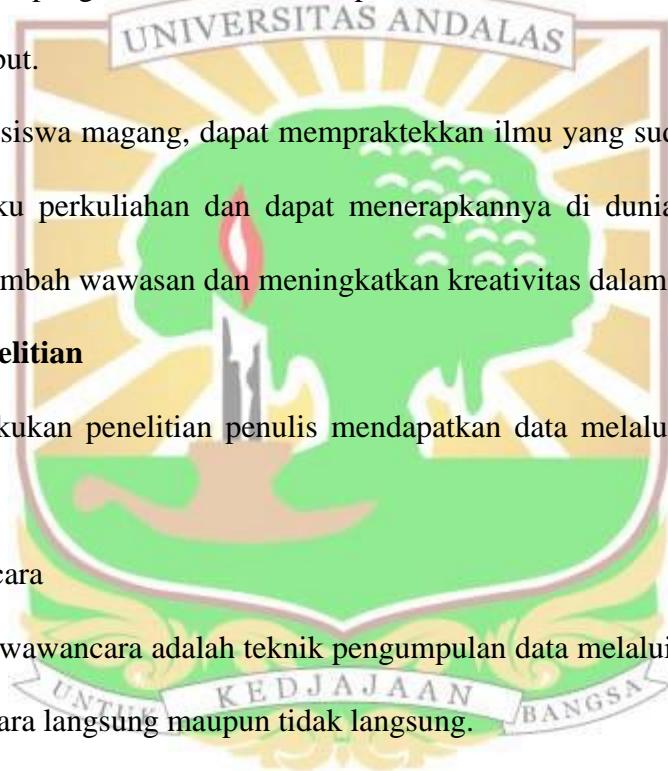
Dalam melakukan penelitian penulis mendapatkan data melalui metode sebagai berikut:

1. Wawancara

Metode wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui sesi tanya jawab baik secara langsung maupun tidak langsung.

2. Observasi

Metode observasi adalah proses pengumpulan data yang dilakukan penelitian secara sistematis dengan mengamati bagaimana proses yang terjadi, dan bertujuan untuk memahami berbagai jenis informasi yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.



1.6 Tempat dan Waktu Magang

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, penulis memilih Pengadilan Tinggi Padang sebagai tempat melakukan kegiatan magang. Kegiatan ini dilaksanakan selama 2 bulan atau 40 hari kerja.

1.7 Sistematika Penulis

Dalam pembuatan Tugas Akhir ini penulis memberikan sistematika, meliputi:

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, tujuan magang, manfaat kegiatan magang, metode penelitian, tempat dan waktu magang, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

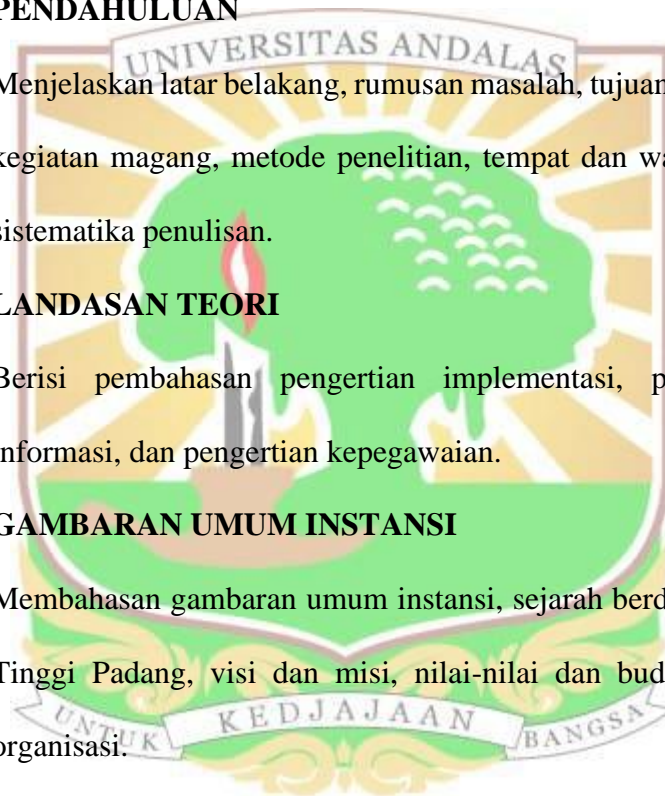
Berisi pembahasan pengertian implementasi, pengertian sistem informasi, dan pengertian kepegawaian.

BAB III GAMBARAN UMUM INSTANSI

Membahasan gambaran umum instansi, sejarah berdirinya Pengadilan Tinggi Padang, visi dan misi, nilai-nilai dan budaya, dan struktur organisasi.

BAB IV PEMBAHASAN

Membahas mengenai bagaimana implementasi dari sistem informasi yang berfokus pada pengelolaan data kepegawaian di Pengadilan Tinggi Padang, Apa saja kendala dalam proses implementasi sistem informasi kepegawaian di Pengadilan Tinggi Padang, dan Bagaimana solusi dalam mengatasi kendala yang menjadi penghambat dalam



proses implementasi sistem informasi kepegawaian di Pengadilan
Tinggi Padang

BAB V PENUTUP

Berisi kesimpulan dari seluruh bab dan saran dari penulis untuk
instansi dengan data yang sesuai dengan penelitian.

